

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pengangguran

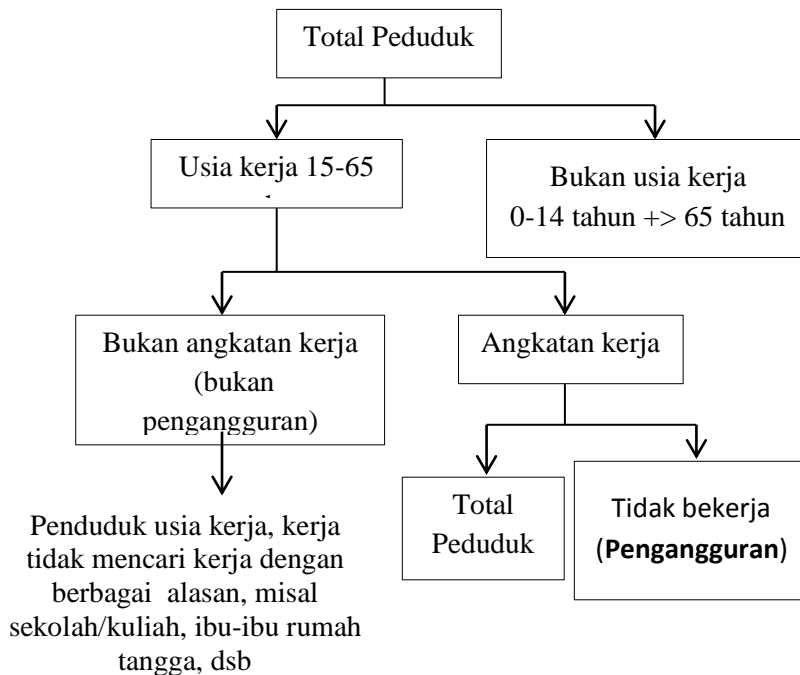
1. Definisi Pengangguran

Pengangguran (*Unemployment*) tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi tidak atau belum menemukan pekerjaan. Jadi pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.¹

Istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja (*Labor Force*). Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk; (a) berusia antara 15 s/d 65 tahun, (b) mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja, (c) serta sedang mencari pekerjaan.² Adapun posisi pengangguran dapat dilihat dari gambar berikut:

¹ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banten: Koperasi Syariah Baraka, 2013), 98.

² Asfia Murni, *Ekonomika Makro* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 213-214.



Gambar 2.1
Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

2. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah presentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan. Besar kecilnya angka pengangguran sangat tergantung dari definisi dan pengklasifikasian pengangguran.³ Adapun dua dasar utama klasifikasi pengangguran yaitu:

³ Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makro Ekonomi)* (Jakarta: LPFEUI, 2008), 378.

- 1) Pendekatan angkatan kerja. Pendekatan ini mendefinisikan penganggur sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Perhitungan tingkat pengangguran yang menggunakan definisi ini adalah:

Tingkat pengangguran

$$= \frac{\text{jumlah yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

- 2) Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour Utilization Approach*) didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- (1) Menganggur (*Unemployed*), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini juga sering dijuluki sebagai pengangguran terbuka (*Open Unemployed*).
- (2) Setengah Menganggur (*Underemployed*), yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam.

- (3) Bekerja Penuh (*Employed*), yaitu orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

3. Jenis-jenis Pengangguran

Dalam membedakan jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya yaitu:⁴

a. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

1) Pengangguran normal atau friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih

⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 328-330.

tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2) Pengangguran siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan

bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

3) Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4) Pengangguran teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

b. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

1) Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi

yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

2) Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3) Pengangguran bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

4) Setengah menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari

seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

4. Dampak Pengangguran

Pengangguran dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian juga tidak mendapat penghasilan, dan yang tidak berpenghasilan tidak dapat membelanjakan uang untuk membeli barang kebutuhan hidup. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi diri penganggur dan keluarganya. Bila jumlah penganggur banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial dan politic, mungkin juga criminal. Tingkat produksi yang sebenarnya bisa diraih tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi terhambat dan tingkat kesejahteraan masyarakat merosot.⁵

Dampak terhadap kestabilan ekonomi, pengangguran dapat mengganggu stabilitas perekonomian yaitu akan menurunkan atau melemahkan *Aggregate Demand* (AD) dan *Aggregate Supply* (AS).

⁵ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 209.

Semakin tinggi pengangguran akan memperkecil penghasilan yang diterima masyarakat. Hal ini akan mengurangi AD karena daya beli masyarakat turun. Berkurangnya AD akan menurunkan produktivitas dunia usaha, sehingga akan menekan produksi ke arah yang lebih rendah dan AS akan turun. Artinya jumlah produk nasional yang tersedia dan siap ditawarkan menjadi semakin sedikit dan bersifat langka, ini akan memicu kenaikan harga. Di samping itu rendahnya AS akan memperparah situasi karena bisa terjadi PHK yang lebih besar dan akan mendorong tingkat pengangguran semakin tinggi.

Dampak buruk pengangguran terhadap perekonomian dapat dilihat dari hal-hal berikut:

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, karena mereka kehilangan mata pencaharian.
2. Pertumbuhan ekonomi menurun, karena daya beli masyarakat turun akan menimbulkan kelesuan pengusaha untuk berinvestasi.
3. Penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak semakin sempit dan sumber penerimaan negara akan berkurang.

4. GNP aktual yang dicapai lebih rendah dari pada GNP potensial, karena factor produksi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu pengangguran pun mempunyai dampak terhadap kestabilan sosial dan politik. Pengangguran yang tinggi akan menimbulkan hal-hal berikut:

1. Berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat seperti kriminalitas baik berupa kejahatan penipuan, perampokan, penyalahgunaan obat-obat terlarang ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal lainnya. Kejadian tingkat pengangguran yang sangat tinggi sangat berpengaruh terhadap aspek psikologis atau beban perasaan yang tidak dapat terkendalikan, sehingga banyak terjadi di tengah masyarakat depresi jiwa dan upaya bunuh diri.
2. Berbagai masalah politik, misalnya timbul rasa ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer, muncul berbagai kritik dan tuntutan yang disertai demonstrasi sehingga situasi politik dalam Negara jadi tidak menentu.⁶

⁶ Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, 217-218.

5. Pengangguran dalam Perspektif Islam

Rasulullah melarang umatnya duduk belaka dan bersikap menyerah atas kesusahan-kesusahannya.⁷ Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu, Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja.⁸

Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam Q.S. al- Balad: 4:⁹

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.”

Kata kabad, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaab bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat

⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 145.

⁸ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta:Kencana, 2008), 227.

⁹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 228.

dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Selain itu, penggunaan kata “kabad” menunjukkan bahwa manusia hendaknya berupaya untuk melakukan dan menanggung segala dan kesukaran dalam perjuangannya untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu, manusia diwajibkan bersusah payah untuk mencapai kejayaan di dunia, dia dijadikan kuat dari segi fisik untuk mananggulangi kesulitan hidup.

Dalam pembahasan ekonomi *al-kasb*, al-Syaibani memulainya dengan memberikan definisi tentang *kasb* (kerja) itu sendiri. *Kasb* merupakan usaha untuk mencari perolehan harta dengan berbagai cara yang halal.¹⁰

Selanjutnya, al-Syaibani menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Dalam konteks kerja, menurut al-Syaibani, untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka seseorang memerlukan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani itu sendiri akan muncul apabila mengkonsumsi makanan yang diperoleh melalui kerja. Dengan demikian, kerja

¹⁰ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 133.

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan sebuah kewajiban.¹¹

Al-Syaibani juga menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup para rasul tersebut. Bahkan al-Syaibani mengatakan bahwa kerja dalam Islam itu hukumnya wajib. Orientasi kerja dalam perspektif al-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhan Allah Swt, baik dunia maupun akhirat. Dengan demikian, kerja dalam perspektif al-Syaibani adalah keseimbangan, terutama keseimbangan duniawi dan *ukhrawi*. Demikian pula sebaliknya, kerja tidak hanya diorientasikan untuk tujuan *ukhrawi* semata, tetapi juga harus ada orintasi duniawi.¹²

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi dan Pengukuran Perumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di diproduksi dalam

¹¹ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, 134.

¹² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, 135.

masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.¹³

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Sebab dengan menggunakan harga konstan pengaruh perubahan harga (inflasi) telah dihilangkan, sehingga angka yang muncul adalah nilai uang dari total *output* barang dan jasa. Perubahan PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan.¹⁴

Mengingat sulitnya mengumpulkan data PDB, maka penghitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat. Biasanya dilakukan dalam dimensi waktu triwulan dan tahunan. Cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi

¹³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, 9.

¹⁴ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 79.

sederhana sekali. Jika selang waktu pertumbuhan hanya satu periode, maka:¹⁵

$$G_t = \frac{(PDBR_t - PDBR_{t-1})}{PDBR_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan)

$PDBR_t$ = Produk Domestik Bruto Riil periode t
(berdasarkan harga konstan)

$PDBR_{t-1}$ = PDBR satu periode sebelumnya

Jika interval waktunya lebih dari satu periode, penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan persamaan eksponensial:

$$PDBR_t = PDBR_0 (1 + r)^t$$

Dimana:

$PDBR_t$ = PDBR periode t

$PDBR_0$ = PDBR periode awal

R = tingkat pertumbuhan

t = jarak periode

¹⁵ Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: LPFEUI, 2008), 129-130.

Tujuan utama dari penghitungan pertumbuhan ekonomi adalah ingin melihat apakah kondisi perekonomian makin membaik. Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari struktur produksi (sektoral) atau daerah asal produksi (regional). Dengan melihat struktur produksi, dapat diketahui apakah ada sektor yang terlalu tinggi atau terlalu lambat pertumbuhannya.¹⁶

2. Faktor Penentu pertumbuhan Ekonomi

Untuk analisis pertumbuhan ekonomi, para ekonom Klasik mengembangkan beberapa factor yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut dapat dirumuskan ke dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$Q = f(K, L, T, U, M, W, I)$$

Dimana: Q= Output atau PDB

K= Barang Modal

L= Tenaga Kerja

T= Teknologi

U= Uang

¹⁶ Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, 131.

M= Manajemen

W= Kewirausahaan

I = Informasi

Berikut adalah pembahasan factor penentu pertumbuhan ekonomi di atas.

1) Barang Modal

Agar ekonomi bertumbuh, stok barang modal harus ditambah. Penambahan stok barang modal dilakukan melalui investasi. Oleh karena itu salah satu upaya pokok untuk meningkatkan investasi adalah menangani factor-factor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang juga harus diingat adalah pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar daripada nol. Sebab, jika investasi neto sama dengan nol, perekonomian hanya dapat memproduksi pada tingkat sebelumnya. Akan lebih baik lagi, jika penambahan kuantitas barang modal juga disertai peningkatan kualitas.

2) Tenaga Kerja

Khusus di negara berkembang, tenaga kerja (TK) masih merupakan factor produksi yang sangat dominan.

Penambahan tenaga kerja umumnya berpengaruh terhadap peningkatan *output*. Yang menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan TK akan terus meningkatkan *output*. Selama ada sinergi antara TK dan teknologi, penambahan TK akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Jumlah TK yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit bila teknologi yang digunakan makin tinggi. Timbullah imbang korban (*trade off*) antara efisiensi produktivitas dan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan *output* pilihan yang rasional adalah teknologi padat modal. Harga dari pilihan tersebut adalah menciutnya kesempatan kerja.¹⁷

3) Teknologi

Kemajuan teknologi akan melahirkan *trade off* terhadap kesempatan kerja. Selain itu, kemajuan teknologi makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya antara negara maju dengan negara berkembang. Untuk mengatasi ketimpangan antara tenaga kerja dan teknologi, beberapa ekonom mengajukan konsep berupa teknologi

¹⁷ Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, 136-137.

tepat guna. Dengan penggunaan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam diri dan lingkungannya. Bahkan kelebihan penggunaan teknologi tepat guna adalah ditekannya pemburosan penggunaan SDA atau energy dalam proses produksi.

4) Uang

Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi, dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien.

Tingkat efisiensi penggunaan uang sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem perbankan. Didorong oleh krisis moneter di medio tahun 1997, Indonesia mulai membenahi sektor keuangan khususnya perbankan. Pembenahan sistem keuangan akan memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pembenahan tersebut proses alokasi sumber daya keuangan sudah lebih baik dan efisien dibanding periode sebelum tahun 1997.

5) Manajemen

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik, terkadang jauh lebih berguna dibanding barang dan modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi yang tinggi. Ada perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi namun berkat manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah Thailand. Dengan potensi pertanian dan keindahan alamnya, Thailand mampu mengelola agribisnis dan sektor pariwisata dengan baik. Bahkan dari hasil pertaniannya yaitu beras ketan, Thailand dapat membeli pesawat buatan Indonesia dengan cara imbal/*counter trade*.

6) Kewirausahaan

Kewirausahaan secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil risiko untuk memperoleh keuntungan. Para wirausahawan/pengusaha harus mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang

dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga timbal baliknya akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.

7) Informasi

Syarat agar pasar berfungsi sebagai alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang (*perfect and simtric information*). Kegagalan pasar merupakan akibat tidak terpenuhinya asumsi ini. Sebab semakin banyak, semakin benar dan semakin berimbang arus informasi, para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik, sehingga sumber daya ekonomi makin efisien. Informasi amat menunjang pertumbuhan ekonomi.¹⁸

3. Teori- Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yaitu melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Perbedaan antara teori yang satu dengan yang lain terletak pada perbedaan fokus

¹⁸ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 82-83.

pembahasan dan atau asumsi-asumsi yang digunakan. Berikut ini adalah uraian mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi:

19

1) Teori Jumlah Penduduk Optimal (*Optimal Population Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh kaum Klasik. Menurut teori ini, dalam pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi *The Law of Deminishing Return* (TLDR), yaitu tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi sebagai tenaga kerja. Pada saat *output* perekonomian sudah mencapai titik maksimal, penambahan tenaga kerja justru akan menurunkan *output* perekonomian.

2) Teori Pertumbuhan Neo Klasik (*Neo Classic Growth Theory*)

Teori ini merupakan pengembangan dari teori klasik sebelumnya. Fokus pembahasan Neo Klasik lebih ditekankan pada akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk

¹⁹ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 84-87.

menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi yang mendasari teori Neo Klasik terdiri dari:

- a. Teknologi dianggap konstan
- b. Tingkat depresiasi dianggap konstan
- c. Tidak ada perdagangan luar negeri
- d. Tidak ada pengeluaran pemerintah
- e. Pertambahan penduduk/tenaga kerja dianggap tetap
- f. Seluruh penduduk dianggap bekerja, artinya jumlah penduduk=jumlah tenaga kerja

Dengan asumsi-asumsi tersebut, Neo Klasik menyimpulkan bahwa factor penentu pertumbuhan ekonomi hanya terletak pada variabel stok barang modal (K) dan tenaga kerja (L).

3) Teori Pertumbuhan Endojenu (Endogenous Growth Theory)

Teori ini dikembangkan oleh Romer (1986). Ia menyoroti bahwa kelemahan teori Klasik dan Neo Klasik terletak pada asumsi yang menganggap teknologi dalam kondisi konstan atau teknologi dianggap sebagai teknologi dianggap sebagai factor eksogen. Konsekuensi

dari asumsi ini adalah perekonomian yang lebih dahulu maju, dalam jangka panjang akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang, selama tingkat penambahan penduduk, tabungan dan akses terhadap teknologi adalah sama.

4) Teori Schumpeter

Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahawanan. Sebab para pengusaha yang mempunyai kemampuan dan keberanian dalam menciptakan inovasi-inovasi baru. Termasuk dalam inovasi adalah penusunan tahap produksi serta masalah organisasi manajemen, agar produk yang dihasilkan dapat diterima pasar.

Menurut Schumpeter, kemajuan perekonomian kapitalis disebabkan diberinya keleluasaan untuk para inovator. Sayangnya, keleluasaan tersebut cenderung memunculkan monopoli kekuatan pasar. Monopoli inilah yang memunculkan masalah-masalah non-

ekonomi, terutama sosial politik, yang pada akhirnya dapat menghancurkan sistem kapitalis itu sendiri.

5) Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh D.S Domar dan R.F. Harrod. Mereka melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana untuk keperluan investasi ini berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung.

4. Kebijakan Mempercepat Pertumbuhan Ekonom

Menurut Sadono Sukirno, kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi yaitu kebijakan dalam modernisasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada atau melakukan transformasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan yang modern. Secara umum Negara yang belum maju atau lambat pertumbuhannya adalah Negara agraris yang produk

nasionalnya di dominasi oleh hasil pertanian. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Negara agraris, adalah dengan cara melakukan inovasi-inovasi baru dalam kegiatan pertanian. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Negara agraris, adalah dengan cara melakukan inovasi-inovasi baru dalam kegiatan pertanian.

2. Mengebangkan infrastruktur. Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh infrastruktur yang tersedia dengan kondisi yang baik. Seperti jalan dan jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan industry, irigasi, penyediaan listrik, jaringan telepon, dan lain sebagainya. Dengan demikian pengembangan infrastruktur untuk menggalakan pembangunan ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilakukan secara terus-menerus.
3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat akan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang berkualitas

tinggi akan semakin cepat terjadinya pertumbuhan ekonomi.

4. Mengembangkan intuisi yang mendorong pembangunan. Pembangunan ekonomi harus secara terus menerus diikuti dengan perkembangan intuisi yang dapat memberikan dorongan pada perkembangan berbagai kegiatan ekonomi. Intuisi-intuisi yang perlu dikembangkan misalnya dalam bentuk peraturan yang diberlakukan untuk mendapatkan pendidikan, subsidi untuk petani yang mau menanam bahan makanan pokok, intuisi dalam mengembangkan investasi, dan lain sebagainya.
5. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiscal dan moneter tidak akan ada artinya tanpa merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Melalui perencanaan pembangunan sebagai kegiatan dapat diselaraskan dan arah pembangunan ekonomi jangka panjang dapat ditentukan. Setiap perencanaan ekonomi perlu menentukan tujuan pertumbuhan ekonomi yang ingin

dicapai dan menentukan strategi dalam melaksanakan perencanaan ekonomi yang telah dirumuskan.²⁰

5. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas ekonomi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materiel spiritual manusia.²¹

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, taqwa dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan diri dari segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala

²⁰ Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, 200-202.

²¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta:Kencana,2015),

ketertinggalan dan keterbelakangan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.²²

Allah Swt berfirman, dalam Q.S Hud: 61:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”²³

Terminologi “pemakmuran tanah” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: *“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, Karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan hancur.”²⁴*

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya

²² Said Sa’ad Marthon, *“Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global,”* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), 158.

²³ Kementerian Agama RI Al- Qur’an dan Terjemahannya, *Yasmina Al-Qur’an & Terjemah,* (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

²⁴ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Ekonomi Islam,* 124-125.

mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, di mana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.²⁵

Sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta sudah menjadi kewajiban untuk berusaha dan bekerja untuk memperoleh kekayaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namun, dalam memperoleh kekayaan, Islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, akan tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat.²⁶

²⁵ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Ekonomi Islam*, 125.

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Depok: PT Raja Grafindo, 2014), 35.

Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting ialah cara cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.

Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta. Begitupun dengan hukum zakat, infaq, sadaqah dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan. Perbaikan system produksi dalam Islam tidak hanya berarti peningkatan

pendapatan yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan tuntunan Islam dalam konsumsi.²⁷ Maka kegiatan produksi harus sejalan dengan kegiatan konsumsi yaitu dengan keharusan memakan makanan yang halal dan memproduksi makanan dan minuman yang halal.

6. Hubungan Pengangguran dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitu pula dengan investasi. Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 112.

pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pengangguran akan menurun.²⁸

C. Teori Upah Minimum

1. Pengertian Upah

Menurut pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Upah adalah hak pekerja/buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/ jasa yang telah atau akan dilakukan
- b. Upah yang diterima pekerja/buruh harus dinyatakan dengan uang

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 311.

- c. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan
- d. Tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah

Pengusaha dalam menetapkan upah dilarang mengadakan distriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dengan pekerja/buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya atau yang mempunyai uraian jabatan (*Job Description*) yang sama.²⁹

2. Upah Minimum

1) Pengertian upah minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Permen No. 1 Tahun 1999 Pasal1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jarring

²⁹ Maimun *Hukum Ketenegakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), 48.

pengaman, ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

2) Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan Upah Minimum Provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari.

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat

puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

3) Upah Minimum Sektoral

Upah Minimum Sektoral dapat terdiri atas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Upah Minimum Sektoral Provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi, sedang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota. Upah Minimum Sektoral merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/ serikat buruh. Usulan Upah Minimum Sektoral (hasil kesepakatan) tersebut disampaikan kepada gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Kementrian Tenaga Kerja untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Sektoral Provinsi dan atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten.³⁰

³⁰ Danang Sunyoto, *Juklak PHK Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja* (Jakarta: Pustaka Yudistira, 2014), 15-17.

3. Jenis Upah

- 1) Menurut status perjanjian kerja meliputi:³¹
 - a. Upah tetap (dibayarkan secara tetap)
 - b. Upah upah tidak tetap (tidak tetap dipengaruhi factor lain)
 - c. Upah harian (perhitungan harian/kehadiran)
 - d. Upah borongan (secara borongan/ berdasarkan volume pekerjaan).
- 2) Berdasarkan cara pembayaran menurut waktu pembayaran meliputi:
 - a. Upah bulanan (dibayar setiap bulan)
 - b. Upah mingguan (dibayar setiap minggu)
- 3) Berdasarkan jangkauan wilayah berlaku meliputi upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi, dan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di daerah kabupaten/kota.

³¹ Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 154.

4. Kebijakan Pengupahan

Kebijakan pengupahan ditempuh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, yaitu dalam rangka mendapatkan penghasilan yang layak sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Kebijakan pengupahan diantaranya:³²

- 1) Upah minimum: diartikan sebagai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja maksimal 1 (satu) tahun agar memperoleh upah seendahnya sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.
- 2) Upah kerja lembur: pengusaha harus memperkerjakan buruh/pekerja sesuai dengan waktu kerja, jika melebihi ketentuan harus dihitung/dibayar lembur. Kerja lembur berarti kerja yang melebihi waktu kerja yang ditetapkan.³³
- 3) Upah tidak termasuk kerja karena berhalangan atau melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya atau

³² Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, 157-159.

menjalankan hak waktu istirahat kerja: *asas no work no pay* dikecualikan disini dalam hal buruh/pekerja tidak bekerja karena berhalangan atau melakukan kegiatan lain diluar pekerjaanya atau menjalankan hak waktu istirahat kerja, upah tetap dibayar. Ketentuan ini diatur dalam pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003.

- 4) Upah untuk pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak: uang yang harus dibayarkan kepada buruh/pekerja apabila diputuskan hubungan kerjanya dan berhak menerimanya sesuai ketentuan (Pasal 156 dan 157 UU No.13 Tahun 2003). Dasar perhitungannya adalah upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian,

maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari.

5. Upah dalam Perspektif Islam

Islam mempunyai perhatian terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dan upah mereka yang adil dan setimpal dengan kewajiban yang mereka tunaikan. Secara umum, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis *akhlak al-karimah* dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam setiap aktivitas.

Adapun dalil yang menyatakan bahwa soal upah ini harus sesuai dengan pekerjaan adalah perintah Allah Azza wa Jalla untuk berlaku adil. Sebab mengurangi upah dari yang mesti diterima oleh buruh termasuk menganiaya mereka.³⁴

Firman Allah dalam Q.S Asy-Syuara: 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

³⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 165.

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*³⁵

Al-Hafiz dalam penjelasannya tentang orang yang mencegah upah buruh, “Dia termasuk dalam kategori orang yang menjual orang merdeka dan memakan hasilnya. Sebab dia memerintahkan mereka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa memberinya imbalan seolah –olah dia memperbudaknya.”³⁶

Dan itulah Rasulullah yang mulia menyuruh cepat-cepat membayar upah buruh, sabdanya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. وَتَمَامُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَأَعْلَمُهُ
أَجْرُهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ.

Artinya: “Berikanlah upah buruh itu selagi belum kering keringatnya.” menurut Al-Baihaqi hadis tersebut sepenuhnya, “Tunjukkan kepadanya upahnya itu selagi ia dalam pekerjaannya.”³⁷

³⁵ Kementerian Agama RI Al- Qur'an dan Terjemahannya, *Yasmina Al-Qur'an & Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

³⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, 167-168.

³⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, 159-160.

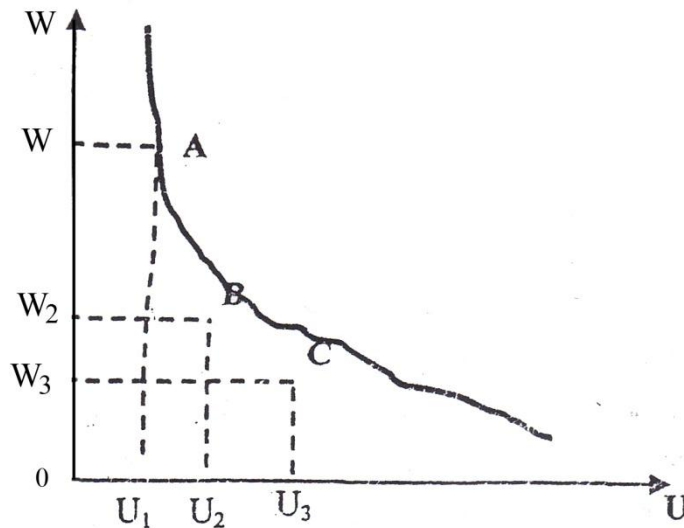
6. Hubungan Upah dan Pengangguran

Terkait dengan tingkat pengangguran, jika tingkat pengangguran turun, maka upah akan cenderung tinggi. Jika perusahaan tidak meningkatkan upah, maka pekerja akan keluar dan mencari pekerjaan baru, karena pada kondisi tingkat pengangguran rendah, kondisi perekonomian dalam keadaan baik dan permintaan akan tenaga kerjapun relative lebih tinggi.³⁸

Kurva Philips menjelaskan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan kenaikan upah nominal. Tingkat upah menurun seiring dengan kenaikan pengangguran.³⁹

³⁸ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 209.

³⁹ Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, 227.



Sumber: Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (2013:104)

Gambar 2.2
Hubungan Antara Tingkat Upah dan Pengangguran

Dari gambar diatas sumbu vertical menggambarkan tingkat upah (*Wage*), sedangkan sumbu horizontal mewakili jumlah pengangguran (*Unemployment*). Dari gambar diatas terlihat biaya dari pengurangan tingkat pengangguran adalah inflasi (naiknya tingkat upah). Misalnya, kondisi awal yang dihadapi adalah titik B, dimana tingkat upah W_2 dan tingkat pengangguran U_2 . Jika tingkat pengangguran ingin dikurangi

menjadi U_1 , tingkat upah naik menjadi W_1 , berarti terjadi inflasi.⁴⁰

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ni Komang Sopianti, A. A Ketut Ayuningsasi. Judul: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali. Jurusan Ekonomi Pembangunan	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui pengaruh serempak maupun parsial pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan upah minimum terhadap jumlah pengangguran di Bali. Penelitian ini menggunakan data <i>time</i> <i>series</i> yaitu tahun 2004- 2010 dan data <i>cross</i> <i>section</i> sebanyak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data <i>time series</i> yaitu tahun 2011-2015 dan data <i>cross section</i> sebanyak

⁴⁰ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 104.

	Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.	sembilan kabupaten/kota di Bali.	enam provinsi di Pulau Jawa.
2	Rahmadin, Abubakar Hamzah, M. Nasir. Judul: Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.	Penelitian ini mengenai pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Aceh. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari variabel angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Aceh. Metode Penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa kuantitatif. Penelitian ini dilakukan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data <i>time series</i> yaitu tahun 2011-2015 dan data <i>cross section</i> sebanyak enam provinsi di Pulau Jawa. Data diperoleh dari BPS dan

		<p>dalam periode 1990-2012. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari Bank Indonesia (BI), Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (DISNAKER) dan BPS.</p> <p>Metode analisis data dengan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, analisis statistik dalam penelitian ini mencakup uji-T, uji F untuk menguji hipotesis, dan R squer adj untuk melihat besarnya</p>	<p>Kementerian Tenaga Kerja (KEMENAKER).</p>
--	--	---	--

		<p>pengaruh yang ditimbulkan. yang pada akhirnya akan membentuk persamaan linear regresi berganda.</p>	
3	<p>Ni Putu Sucitrawati, Sudarsana Arka. Judul: Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Bali. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh inflasi, investasi, dan tingkat upah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Bali tahun 1998-2011 baik secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.</p>	<p>Penelitian ini membahas pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2011-2015 secara parsial dan simultan.</p>

4	<p>Putu Eka Suwandika, I Nyoman Mahaendra Yasa. Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data sekunder, menggunakan teknik analisis jalur (<i>path analysis</i>).</p>	<p>Penelitian ini membahas pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa 2011- 2015. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan metode deskriptif kuantitatif.</p>
---	--	---	---

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran.⁴¹

Hipotesis yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. H_o^1 : Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa
 H_a^1 : Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa
2. H_o^2 : Upah minimum regional secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa.
 H_a^2 : Upah minimum secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa.
3. H_o^3 : Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa.

⁴¹ Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 98.

Ha³ : Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa.